

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MEMBELA MASYARAKAT DALAM KASUS KABUT ASAP DI PEKANBARU TAHUN 2014

Abstrak

Bencana asap Riau tahun 2014 telah menyebabkan banyak warga masyarakat yang menderita sakit seperti asma, iritasi kulit dan terkena pneumonia. disebabkan lambatnya pemerintah menyelesaikan masalah kabut asap di Riau, maka berbagai organisasi masyarakat sipil bangkit melakukan berbagai upaya membela masyarakat yang pada akhirnya mampu memaksa pemerintah pusat terlibat dalam menyelesaikan masalah asap Riau. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai upaya yang dilakukan organisasi tersebut di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan, organisasi intra dan ekstra kampus yang peduli dengan masalah asap, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Proses penyadaran dilakukan dengan mengundang elemen-elemen OMS berdiskusi secara berulang-ulang guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai tanpa upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama perusahaan besar. Akhirnya mereka memiliki kesadaran yang sama, memiliki rasa percaya dan bersepakat melakukan gerakan bersama. Ada dua upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dan perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).

Kata Kunci; Organisasi Masyarakat Sipil, Gerakan Masyarakat.

***Ali Yusri, Adlin**

*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

PENDAHULUAN

Satu di antara fungsi Penting Organisasi Masyarakat Sipil adalah menjalankan fungsi advokasi atau membela hak masyarakat. Mulyadi S (dalam Rijal & Karim, 1991:205-2010) menyatakan bahwa Kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mulai menjamur sejak tahun 1970-an, bermaksud mengantisipasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat bawah termasuk di pedesaan yang dirugikan oleh sistem pembangunan sentralistis. Namun demikian perjuangan organisasi masyarakat sipil yang bergerak mengadvokasi isu lingkungan tampaknya cukup sulit sebab pemerintah tampaknya belum begitu peduli dengan isu lingkungan. Menurut Riko Kurniawan, Direktur

Wahana Lingkungan Hidup Riau menilai pemerintah perlu meningkatkan komitmennya untuk melakukan upaya yang luar biasa untuk menghentikan bencana ekologis yang sudah mengakibatkan kerugian luar biasa. (<http://www.walhi-riau.or.id/walhi-riau-indonesia-butuh-pengadilan-khusus-lingkungan/>, akses 23 juni 2014).

Bencana asap Riau tahun 2014 sudah membahayakan kehidupan masyarakat. Ramai warga masyarakat yang menderita sakit akibat kabut asap, sebagaimana diberitakan warga yang terkena ISPA mencapai 41.589 jiwa dengan rincian 1.544 jiwa menderita asma, 1.385 jiwa menderita iritasi mata, 2.084 jiwa terkena iritasi kulit dan 862 jiwa terkena pneumonia. Akibat asap,

Hasil Penelitian

terganggunya penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dalam dua pekan terakhir dan ada beberapa penerbangan tertunda karena jarak pandang yang berkurang. (<http://www.jpnn.com/read/2014/03/12/221592/Bencana-Asap-Riau,-Mengulang-Kisah-1997>, akses 22 Juni 2014).

Namun respon pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat lamban dalam menangani kasus kabut asap. Satgas Tanggap Darurat Asap Riau mempertanyakan kenapa tidak ada satu pun perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) hadir dalam rapat koordinasi itu, serta kekesalan ditunjukkan oleh Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai lambannya respon instansi pemerintah daerah di Riau. (<http://antarariau.com/berita/27706/pemerintah-daerah-riau-lamban-antisipasi-kebakaran-hutan>, akses 22 juni 2014).

Akibat lambannya pemerintah menyelesaikan masalah kabut asap di Riau, maka berbagai organisasi masyarakat sipil bangkit melakukan berbagai upaya membela masyarakat yang pada akhirnya mampu memaksa pemerintah pusat terlibat dalam menyelesaikan masalah asap Riau. Sehubungan dengan itu pertanyaan yang diajukan adalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan munculnya kesadaran organisasi masyarakat sipil membela masyarakat dalam kasus kabut asap?
2. Strategi apasajakah yang dipilih oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendesak pemerintah peduli dan menyelesaikan masalah kabut asap?

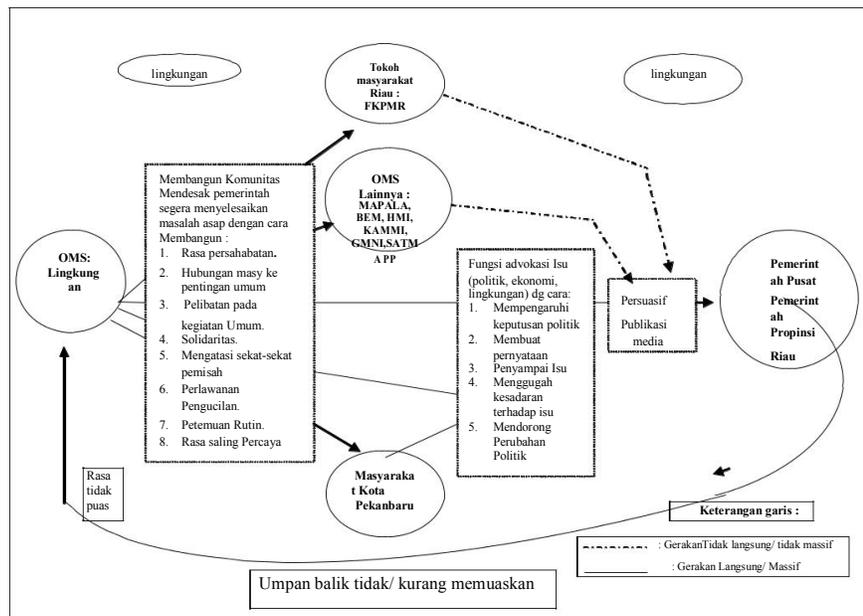
TUJUAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk :

1. Menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil di Pekanbaru untuk membela masyarakat agar terbebas dari kabut asap.
2. Menganalisis berbagai upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap.

KERANGKA BERFIKIR

KERANGKA TEORI



Masyarakat sipil menurut AS Hikam terwujud dalam berbagai organisasi/ asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Organisasi non pemerintah, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan adalah penjawantahan kelembagaan masyarakat sipil. Tidak semua kelompok memiliki kemandirian yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi (Culla, 2006: 21). Menurut Culla (2006: 63) salah satu penjawantahan masyarakat sipil yang kerap terangkat dan menjadi titik fokus perhatian adalah *Non Governmental Organization (NGO)* dan oleh banyak kalangan di Indonesia dialih bahasakan menjadi Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mengutip pendapat Abdi Rahmat, Culla (2006:31) menjelaskan tiga konsep peran organisasi non politik (Ornop) sebagai gerakan masyarakat sipil. Pertama, peran ornop sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing Power*) dalam mengontrol, mencegah dan membendung dominasi serta manipulasi negara maupun dunia usaha (masyarakat ekonomi) terhadap masyarakat. Peran kritis, politis, konfliktual, dan transformatif ini biasanya dimainkan melalui advokasi kebijakan, lobi, pernyataan politik, protes dan aksi unjuk rasa ditingkat nasional maupun internasional. Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Peran ini dijalankan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun keswadayaan, menjaga kemandirian, menggalang partisipasi, dan memperkuat hak-hak warga negara. Peran ini diaktualisasikan lewat jalur pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, penerangan dan penerangan metodologi alternatif yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Ketiga, peran sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menautkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah atau negara maupun dengan aktor-aktor non negara seperti dunia usaha dan lembaga donor. Peran sebagai

mediator juga dipakai untuk memperantarai masyarakat dengan Ornop, antar Ornop sendiri, serta jejaring kerja sama antar kelompok masyarakat.

Mati (Voluntas, 2012, 23: 68) mengemukakan bahwa gerakan sosial dapat terjadi sebagai respon masyarakat yang ingin bebas dari cengkeraman para elit ekonomi dan politik. Selanjutnya Millier et.al mengutip pendapat Jessop (dalam Ed. Bernard Enjolras & Karl Henrik (eds.), 2009: 77) berpendapat bahwa masyarakat melalui berbagai agen kekuatan sosial, berusaha untuk membatasi dampak negatif akibat pasar bebas dengan menentang berbagai bentuk regulasi ekstra ekonomi yang bersifat mendukung dan mempertahankan akumulasi kapitalis. Dengan demikian, masyarakat sipil lahir sebagai produk alami dari pembangunan ekonomi kapitalis dan yang bersamaan dengan perluasan kelas menengah. Tugal (Theor Soc, Vol 38, 2009:428) mengutip pendapat Cohen (1985) yang menyatakan bahwa gerakan sosial baru “menargetkan domain sosial “Masyarakat sipil” bukan ekonomi atau negara.

METODE PENELITIAN

Informan dan key informan dipilih dengan teknik Purposive Sampling. menjelaskan bahwa penarikan sampel jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menentukan sendiri informan penelitiannya yang dianggap benar-benar mengetahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai masalah penelitian. Neuman (2003:138) mengutarakan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan cara menarik sumberdata dari berbagai narasumber yang mempunyai perspektif, latar belakang dan karakteristik sosial yang berbeda.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang upaya organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah menyelesaikan masalah asap, peneliti dengan sengaja akan mengambil data dari informan penelitian dari berbagai pihak yang mempunyai informasi yang mampu mengungkap

permasalahan penelitian antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan, organisasi intra dan ekstra kampus yang peduli dengan masalah asap, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Informan Penelitian terpilih yaitu Organisasi Masyarakat Sipil mengadvokasi isu Lingkungan; Organisasi Intra Kampus; Organisasi Ekstra Kampus; Pemuka Masyarakat Riau; Pemerintah propinsi Riau; Pemerintah pusat; Media massa

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab munculnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil di Pekanbaru untuk membela masyarakat agar terbebas dari kabut asap.

Organisasi masyarakat sipil yang selama ini peduli dengan Lingkungan di Riau, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Scale Up, dan Green Peace, sudah menyadari bahwa kabut asap merupakan bencana yang terus berulang. Menurut Walhi kejadian kabut asap mulai tahun 1997, ketika kampanye pemerintah orde baru yang menggiatkan pembukaan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan dijadikan Hutan Tanaman Industri di Wilayah Sumatera. Berdasarkan fakta dan pengamatan Walhi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 disimpulkan bahwa pemberian izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kepada perusahaan untuk membuka lahan dan mengambil kayu di dalamnya sarat dengan proses korupsi dan ketidaktegasan pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku pembakar lahan dari pihak perusahaan adalah penyebab utama berulangnya bencana asap di Riau. Korupsi dalam pemberian izin pembukaan lahan. Selain itu, jika pemerintah tegas menegakkan hukum terhadap pelaku pembakar lahan dari pihak perusahaan, bencana kabut asap bisa berkurang.

Pada tahun 2014, kembali terjadi bencana kabut asap di Riau yang membuat kondisi udara di beberapa kabupaten di Riau sudah menunjukkan level berbahaya. Kondisi udara yang demikian telah

menyebabkan ribuan orang terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan bahkan wanita hasil sudah dianjurkan untuk mengungsi sebab kondisi asap yang demikian dapat menggugurkan janin wanita hamil. Sudah muncul keresahan dari berbagai kalangan masyarakat di Riau, namun belum muncul sebuah gerakan yang berusaha membela masyarakat dari Bencana kabut asap.

Melihat kondisi demikian maka Walhi, Scale Up dan *Green Peace* mencoba membangun kesadaran berbagai elemen masyarakat di Riau terutama elemen mahasiswa, yang dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UR) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (BEM UIN Susqa) bahwa kabut asap ini hanya dapat diselesaikan dengan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan yang diduga juga telah terlibat korupsi dalam pemberian izin dengan pemerintah. Proses penyadaran dilakukan oleh walhi dkk dengan mengundang elemen-elemen mahasiswa untuk berdiskusi secara berulang-ulang guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai tanpa upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama perusahaan besar. Akhirnya berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang organisasi memiliki kesadaran yang sama, memiliki rasa percaya dan bersepakat melakukan gerakan bersama dibawah payung gerakan yang dinamakan Masyarakat Menuntut Kejahatan Kabut Asap (MASKER) pada bulan maret tahun 2014.

B. Upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap.

Ada dua upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil Riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dan perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).

Perjuangan dengan jalur litigasi dilakukan dengan mengadukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, aktor yang terlibat dalam korupsi kehutanan ke aparat hukum. Jalur non litigasi dilakukan dengan membuat gerakan sosial menuntut pemerintah menuntaskan segala hal yang berhubungan dengan berulangnya kasus kabut asap.

Di tahun bulan maret tahun 2014, MASKER melakukan demonstrasi yang diikuti dari berbagai elemen masyarakat hari jumat tanggal 14 maret tahun 2014 di halaman kantor gubernur Riau dengan mengajukan 7 tuntutan, yaitu :

1. Memerintahkan Presiden SBY menetapkan Riau sebagai daerah dengan keadaan bencana nasional (Riau Gawat Darurat)
2. Mendesak Presiden SBY untuk mencabut izin-izin perusahaan perusak hutan (RAPP Group, Sinar Mas Group, PT. Nasional Sagu Prima (NSP), Asian Agri, PT. ADEI Plantation dan Perusahaan lain yang terlibat pembakaran lahan.
3. Mendesak Presiden SBY serius menegakkan hukum terhadap terhadap aktor intelektual pembakar hutan, sawit dan lainnya di Riau.
4. Mendesak otoritas jasa keuangan (OJK) untuk mengevaluasi dan tidak memberikan rekomendasi pencairan dana asuransi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan karena adanya dugaan kejahatan asuransi di balik kebakaran lahan perusahaan.
5. Mendesak SBY untuk menghentikan (moratorium) pemberian izin atas perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan dan melakukan audit lingkungan.
6. Mendesak SSBY dan Mengklarifikasi bahwa bukan masyarakat yang membakar hutan tersebut serta menyelidiki pembiaran kebakaran lahan yang dilakukan perusahaan.
7. Mendesak SBY dan Gubernur Riau Memberikan Kompensasi kesehatan untuk dampak asap terhadap masyarakat Riau 10 tahun ke depan.

Kegiatan demonstrasi dan penyampaian tuntutan dilakukan dengan mengundang media

massa lokal maupun nasional. Media Massa Nasional yang meliput antara lain adalah TV One dan Metro TV. Begitu demonstrasi dimulai hari jumat (14/3/2014), maka gerakan tersebut langsung muncul di running text TV one dan Metro TV sehingga mendapat perhatian dari berbagai kalangan di level nasional, termasuk presiden SBY. Hal ini dibuktikan dengan hari sabtu (15/3/2015) Presiden SBY melakukan *teleconference* dengan 4 orang Gubernur, termasuk gubernur Riau. Selanjutnya hari Minggu (16/3/2014), Presiden SBY mendarat di Riau untuk memimpin penanggulangan kabut asap di Riau.

KESIMPULAN

Proses penyadaran masyarakat di Riau oleh organisasi masyarakat sipil muncul ketika mereka memandang kabut asap sebagai masalah bersama, sehingga mereka lebih mudah menggerakkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk melakukan tuntutan supaya kabut asap dapat diatasi. Upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Riau yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dengan mengadukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, aktor yang terlibat dalam korupsi kehutanan ke aparat hukum. Selain itu, perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi), dilakukan dengan membuat gerakan sosial menuntut pemerintah menuntaskan segala hal yang berhubungan dengan berulangnya kasus kabut asap.

DAFTAR PUSTAKA

- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta :LP3ES
- Malo, Manasse & Trisnoningti, Sri. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Mati, Jacob Mwathi. "Social Movements and Socio-Political Change in Africa: The

Hasil Penelitian

- Ufungamano Initiative and Kenyan Constitutional Reform Struggles (1999–2005)”. *Voluntas* (2012) 23:63–84.
- Miller, Chris et.al “Toward A Typology Of Civil Society: Understanding Non-Government Public Action” *Comparative Social Research Volume 26 : Civil Society In Comparative Perspective* Ed. Bernard Enjolras & Karl Henrik Sivesind. UK: Emerald Group Publishing Limited, 2009.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Pearson Education, Inc,
- S, Mulyadi. “Lembaga Swadaya Masyarakat dan Transformasi Sosial”, *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Ed Fauzie Ridjal & M. Rusli Karim. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Tuđal, Cihan. “Transforming everyday life: Islamism and social movement theory” *Theor Soc* (2009) 38:423–458
(<http://www.walhi-riau.or.id/walhi-riau-indonesia-butuh-pengadilan-khusus-lingkungan/>, akses 23 juni 2014).
- (<http://www.jpnn.com/read/2014/03/12/221592/Bencana-Asap-Riau,-Mengulang-Kisah-1997>, akses 22 Juni 2014).
- (<http://www.antaraneews.com/berita/420908/riau-tetapkan-kabut-asap-kejadian-luar-biasa>, akses 22 Juni 2014).
- (<http://antarariau.com/berita/27706/pemerintah-daerah-riau-lamban-antisipasi-kebakaran-hutan>, akses 22 juni 2014).

